
PENGARUH BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KAPASITAS FISKAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011 - 2020

Oleh:

Saparman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: saparman4581@grad.unri.ac.id

Syapsan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: syapsan@lecturer.unri.ac.id

Dahlan Tampubolon

Pusat Studi Sosial Ekonomi, LPPM Universitas Riau

Email: dahlan.tampubolon@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History :

Received 03 Januari - 2022

Accepted 29 January - 2022

Available Online

31 Januari - 2022

Abstract

This study aims to analyze the effect of spending on goods and services, capital expenditures and economic growth on fiscal capacity in districts/cities in Riau Province in 2011 – 2020. The data analysis method uses panel regression analysis with the EViews10 program. Panel data is a combination of time series and cross section data. The results of this study indicate that expenditure on goods and services has a negative and insignificant effect on fiscal capacity in districts/cities in Riau Province in 2011 – 2020. This means that changes in goods and services spending have not been able to affect changes in fiscal capacity in districts/cities in Riau Province. so this means contrary to the hypothesis. Capital expenditures have a significant positive effect on fiscal capacity in regencies/cities in Riau Province in 2011 – 2020. This means that an increase in capital expenditure can encourage an increase in fiscal capacity, this is because an increase in capital expenditure will encourage an increase in the provision of assets owned by the region so that the existence of assets This will be one of the sources of regional revenue, namely from levies and taxes so that it will encourage fiscal capacity and thereby increase fiscal capacity in districts/cities in Riau Province, this means that it is in line with the hypothesis. Economic growth has a significant positive effect on fiscal capacity in districts/cities in Riau Province in 2011 – 2020. This means that increased economic growth can encourage an increase in fiscal capacity, this is because an increase in economic growth will encourage an increase in income and the production of goods and services in the region. so that it will become one of the sources of regional revenue, namely from levies and taxes so that it will encourage fiscal capacity thereby increasing fiscal capacity in districts/cities in Riau Province, this means that it is in line with the hypothesis.

Keyword :

*Expenditure On Goods
And Services, Capital
Expenditure Economic
Growth Fiscal
Capacity*

1. PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No 32 dan No 33 tahun 2004, adapun sisi yang terkandung dalam pelaksanaan kebijakan otonomi otonomi, yaitu politik dan ekonomi. Pelaksanaan otonomi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kewenangan daerah provinsi maupun kota/kabupaten untuk merencanakan dan mengambil berbagai kebijakan pemerintahan.

Pandangan dari aspek ekonomi tidak menunjukkan adanya keluasan kewenangan daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber keuangan daerah. Artinya masih terjadi ketergantungan keuangan (fiskal) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar (Murniasih & Mulyadi, 2011). Pada sisi lain masing-masing pemerintah kota/kabupaten menghadapi berbagai masalah mendasar yang menuntut pembiayaan. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat akan menjadi sebuah persoalan yang akan memicu besarnya pembiayaan.

Kapasitas fiskal ialah suatu bentuk dalam menilai perolehan penerdapatan yang terdapat pada APBD yang mana bertujuan dalam membiayai belanja pemerintah terutama belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas fiskal ialah salah satu bentuk alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui banyaknya kebijakan yang dihasilkan.

Menurut Lewis (2003), peningkatan operasi pemerintah daerah ialah suatu ukuran yang dalam dilakukan dalam upaya penilaian kapasitas fiskal. Yang dikatakan dengan peningkatan operasi atau surplus operasi ialah suatu bentuk pengukuran terkait dengan kemampuan mengelola dana yang tersedia di daerah.

Pemerintah pusat tentunya pihak yang tidak terpisahkan dengan kapasitas fiskal daerah,

adapun bentuk keterkaitan pemerintah pusat dengan kapasitas fiskal ialah pemerintah pusat yang selalu berupaya dalam meningkatkan meratanya layanan yang diperoleh masyarakat salah satu bentuk hal melalui kebijakan yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu adanya dana transfer yang disalurkan pusat kepada pemerintah daerah (Petchey, 2011).

Teori pengeluaran pemerintah menerangkan bahwasanya kegiatan ekonomi akan menjadi tinggi hal tersebut karena tingginya keterkaitan antara peningkatan secara agrigat pengeluaran pemerintah dengan terciptanya kegiatan pembangunan (Sukirno, 2013), sehingga realisasi APBD meningkat hal tersebut juga akan mengakibatkan peningkatan belanja daerah tentunya hal tersebut akan mendorong peningkatan ekonomi (Darise, 2006).

Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwasanya peningkatan pendapatan yang menjadi sumber penerimaan daerah ialah suatu persoalan yang tidak dapat dihindari pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pada saat penerimaan dapat didorong mengalami peningkatan, maka hal tersebut akan baik dalam menjalankan pelaksanaan urusan pemerintah karena berkaitan dengan penggunaan belanja daerah.

Provinsi Riau ialah daerah di Indonesia dengan berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran yang harus di penuhi, dalam menjalankan kegiatan rumah tangga daerah tentunya Provinsi Riau harus memiliki alokasi pendapatan untuk mewujudkan daerah yang mandiri sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal, berikut ini dapat dilihat pendapatan dan pengeluaran daerah di Provinsi Riau :

Tabel 1
Total Pendapatan dan Total Belanja Daerah Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 (Ribu Rp)

Kabupaten/Kota	Pendapatan	Belanja
Kuantan Singingi	101.901.127	12.187.933
Indragiri Hulu	1.451.073.078	209.389.102

Indragiri Hilir	2.140.632.371	246.585.986
Pelalawan	1.414.736.945	191.480.483
Siak	2.263.541.825	154.000.000
Kampar	2.715.599.831	50.224.923
Rokan Hulu	1.438.623.273	32.535.832
Bengkalis	2.640.703.709	222.485.956
Rokan Hilir	2.147.075.020	154.991.221
Kepulauan Meranti	1.354.326.093	68.400.000
Pekanbaru	2.612.142.089	1.650.000
Dumai	1.396.018.821	87.075.489
RIAU	21.676.374.182	1.276.015.704

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

Jika dilihat dari 10 kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis ialah daerah dengan jumlah pendapatan terbanyak dibandingkan kabupaten lain yaitu Rp2.640.703.709 ribu dengan jumlah pengeluaran sebanyak Rp222.485.956 ribu, bahkan jumlah ini lebih besar dibandingkan Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota provinsi. Selain itu untuk daerah yang sedikit besaran pendapatan yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Rp1.354.326.093 ribu dengan pengeluaran sebesar Rp68.400.000 ribu.

Belanja daerah (Permendagri No. 21 Tahun 2021) merupakan salah satu pengeluaran dalam anggaran yang mana akan mengurangi kekayaan daerah. Adapun tujuan dari belanja daerah ialah salah satu pengeluaran yang wajib yang ditentukan undang – undang dan tentunya dibawah kebijakan provinsi maupun kabupaten dan kota diantaranya belanja wajib serta belanja urusan pilihan daerah.

Belanja daerah bertujuan memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pada saat pendapatan mengalami peningkatan maka kemampuan dan kemandirian mengatur keuangan daerahnya. Masyarakat juga memiliki andil besar dalam menciptakan kemandirian daerah yaitu melalui penerimaan PAD yaitu melalui kesadaran akan kewajiban atas pajak serta retribusi.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dengan peningkatan belanja daerah akan mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui PAD yaitu dengan membayar berbagai bentuk retribusi daerah dari kegiatan belanja yang dilakukan, sehingga hal tersebut akan mendorong peningkatan kapasitas fiskal. Adapun jenis belanja langsung yang

dimaksud ialah barang dan jasa serta belanja modal.

Pertumbuhan ialah kondisi yang menggambarkan meningkatnya nilai dari kegiatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian dalam satu periode biasanya satu tahun. Adapun yang dapat mendorong peningkatan barang dan jasa ialah kemampuan produksi melalui investasi yang dapat mendorong semakin besarnya produksi serta kemajuan teknologi yang cepat yang tentunya dalam mendorong kegiatan produksi menjadi lebih cepat (Sukirno, 2013).

Sehingga berdasarkan penjelasan teori yang dikemukakan Peacock dan wiseman, bahwasanya penerimaan PDRB yang semakin meningkat maka akan mendorong peningkatan PAD, yang mana pada saat PAD besar maka dengan itu menyebabkan peningkatan kapasitas fiskal juga mengalami peningkatan.

Provinsi Riau yang kaya akan hasil bumi baik itu pertambangan maupun perkebunan, terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, seperti dijelaskan sebelumnya bahwasanya kondisi kapasitas fiskal dipengaruhi oleh pengeluaran belanja pemerintah dan kondisi perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Belanja Barang dan Jasa (Juta Rp)	Barang Modal (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kuantan Singingi	295.491	204.766	0.98
Indragiri Hulu	382.183	126.576	-0.12
Indragiri Hilir	670.873	446.992	0.34
Pelalawan	457.871	254.603	2.24
Siak	730.789	379.751	-0.10
Kampar	660.204	548.062	-0.90
Rokan Hulu	386.670	207.391	1.51
Bengkalis	727.972	581.830	-3.30
Rokan Hilir	753.891	375.553	-0.96
Kepulauan Meranti	427.644	319.924	0.43
Pekanbaru	967.046	541.894	-4.38
Dumai	465.428	266.631	-1.05
RIAU	6.926.068	4.253.979	-1.12

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, 2021

Jika dilihat perkembangan belanja barang dan jasa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada 10 kabupaten dan 2 kota di

Provinsi Riau, maka hal ini tentunya akan memiliki kaitan dengan kapasitas fiskal. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, meskipun hal ini dirasakan hampir merata di daerah kabupaten di Provinsi Riau begitu dengan daerah kota yang bahkan angka pertumbuhannya minus. Hal tersebut tentunya imbas akibat bencana besar yang menghantam dunia yaitu pandemi Covid-19 yang mana pada awal 2020 telah menhantam seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Riau.

“Kajian terdahulu terkait dengan kapasitas fiskal telah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh (Limpele, Rotinsulu, & Roro, 2021) terkait pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara, namun yang membedakan kajian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda, selain itu penggunaan variabel pengeluaran pemerintah yang digunakan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, sedangkan penelitian ini menggunakan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Selain itu, (Sriyana, 2009) juga mengkaji terkait analisis kapasitas fiskal daerah: studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul, pada penelitian terdahulu dikaji di lokasi penelitian yang berbeda, selain itu pada penelitian ini melihat faktor yang mendorong kapasitas fiskal dari pertumbuhan ekonomi.”

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Otonomi Daerah

“Otonomi ialah bentuk menciptakan masyarakat yang otonom, didalam kebijakan otonomi, dimana daerah akan dapat mengelola dan mengembangkan keunggulan yang dimiliki oleh daerah dengan leluasa sehingga yang dimiliki dapat dikelola dengan optimal. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat mendorong peningkatan peluang yang sangat besar dalam keseluruhan elemen yang dimiliki daerah akan tetapi tentunya harus tetap mengikuti aturan terkait pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.”

“Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.”

Kapasitas Fiskal

Bank Dunia menekankan bahwa kapasitas fiskal menjadi salah satu penentu dari kemampuan dalam mengatasi besarnya defisit tentunya dengan memperhatikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan serta keberlanjutan hutang. Dengan demikian, ukuran ini menilai apakah suatu Negara mampu untuk mengambil hutang tambahan sebagai sarana untuk mengatasi atau menangkalkan dampak krisis ekonomi. Jika suatu negara memiliki kapasitas fiskal yang memadai, dapat mempertahankan belanja publik, bahkan mengadopsi paket stimulus fiskal dan akibatnya lebih tahan dalam menghadapi kejutan ekonomi (Hakasari, 2015)

Konsep kapasitas fiskal berfokus terutama pada defisi Negara yang besar dengan kemampuan Negara dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebuah negara tentu saja bisa mengatasi kendala fiskal yang ketat dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran atau meningkatkan tambahan pendapatan, tetapi umumnya sulit untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam jangka pendek. Dalam pengertian ini, kapasitas fiskal sebagaimana didefinisikan di sisi adalah lebih sempit dari konsep ruang fiskal (Hakasari, 2015).

“Compson dan Navratil 1997 mendefinisikan kapasitas fiskal sebagai kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber daya yang dimilikinya. Ditambahkan bahwa terdapat beragam cara pengukuran yang digunakan untuk mengestimasi kapasitas fiskal suatu daerah dan masing-masing cara memiliki keterbatasan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa terdapat dua kategori umum untuk pengukuran kapasitas fiskal. Yaitu indeks sumber daya ekonomi atau pendapatan daerah dan indeks penerimaan relatif yang dapat

ditingkatkan di bawah suatu standar kebijakan fiskal (Hakasari, 2015).”

Kebanyakan ukuran kapasitas fiskal termasuk defisit fiskal, utang luar negeri, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, dan tingkat tabungan. Indikator-indikator ini mencerminkan solvabilitas dan posisi cadangan negara dan karenanya indikator apakah negara mampu untuk mengambil lebih banyak utang atau mengendalikan cadangan sendiri untuk mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran selama krisis. Sehingga yang dikatakan dengan kapasitas fiskal ialah kemampuan negara/daerah dalam menghasilkan sejumlah pendapatan.

Kapasitas fiskal diperoleh melalui penerimaan daerah, adapun rumus kapasitas fiskal ialah sebagai berikut (Lisna, Sinaga, Firdaus & Sutomo, 2013) :

“Kapasitas Fiska = PAD + Bagi Hasil Pajak +
Bagi Hasil SDA”

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa bertujuan untuk pembiayaan yang langsung habis baik kegiatan yang di perjual nelikan ataupun tidak, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah² meliputi:

- a. Belanja yang diadakan di lingkungan K/L/D/I membiayai sebagian atau seluruhnya.
- b. untuk berinvestasi di lingkungan Bank Indonesia, BUMN dan BUMD yang pengeluarannya bersumber dari APBN/APBD.

“Pengadaan barang/jasa untuk investasi ialah pengadaan untuk belanja modal dalam meningkatkan asset dan/atau penambahan kapasitas. Kebijakan pengadaan barang/jasa mempertimbangkan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.”

Belanja Modal

Belanja Modal ialah pengeluaran yang bermanfaat dalam jangka panjang yang mana dapat meningkatkan asset serta kekayaan dan tentunya memiliki biaya rutin dalam belanja administrasi umum yang bertujuan untuk pemeliharaan (Halim, 2004). Untuk mengetahui besaran belanja modal Kab/Kota terlihat pada Laporan Realisasi APBD. Belanja Modal ialah bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan peningkatan penghasilan aktiva tetap yang dilaksanakan pemerintah (Nordiawan, 2010).

Terdapat 3 aset tetap dalam pembangunan, penukaran serta pembelian dengan kategori.

- 1) Melalui pengeluaran dapat meningkatkan asset pemerintah daerah
- 2) Pemda memberikan batasan dalam alokasi belanja pada asset pada saat telah berlebih dari anggaran.

“Pengadaan asset tidak digunakan bertujuan untuk diperjual belikan akan tetapi dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah bentuk perhitungan bertujuan menjelaskan perubahan perkenomian dari perbandingan tahun tertentu yang terus berkembang (Sukirno, 2013). Dengan adanya peningkatan jumlah PDB/PNB tidak tergantung kepada perubahan pertumbuhan penduduk, kondisi pada struktur ekonomi serta perbaikan sistem kelembagaan yang mengalami perubahan ataupun tidak hal tersebut merupakan gambaran dari kondisi pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Mankiw, 2013), “PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap

orang di dalam perekonomian”. Selain itu, dalam menentukan nilai PDB dapat diketahui berdasarkan tota; pengeluaran total dalam kegiatan perekonomian.

Hipotesis

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan Hipotesis dalam penelitian ini sebagai :

- a. Belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020.
- b. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020.
- c. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif Signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data panel yang terdapat pada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, penelitian dengan data *time series* dan *cross section* tahun 2011 - 2020.

Jenis data penelitian ini ialah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dari Tahun 2011 sampai Tahun 2020 dalam bentuk laporan keuangan daerah. Adapun alasan pemilihan rentang waktu penelitian dari 2011 hingga 2020 mengingat terdapat kabupaten yang memiliki publikasi data yang lengkap hanya dalam rentang waktu tersebut, sehingga hal tersebut yang mendorong keputusan data penelitian berkisar antara tahun 2011 – 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan data panel sehingga metode analisis data yang tepat digunakan untuk melihat pengaruh X terhadap Y yaitu dianalisis dengan regresi panel dengan program EViews10. “Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Chow test yakni perbandingan dipakai apabila nilai prob $F < 0,05$ maka sebaiknya menggunakan *fixed effect model*. Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat uji chow :

Tabel 3
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.9449	32 (11,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	139.361564	11	0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Diperoleh probabilitas yaitu 0,0000. bahwa Nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga pada uji tersebut model yang diterima adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

“Uji Hausman dilakukan apabila hasil pengujian pada *chow test* menerima H1, yaitu model *fixed effect model* yang kemudian akan dibandingkan dengan model *random effect model*. Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini :”

- 1. Menerima H0 jika prob $> \alpha 5 \%$ (0,05)
- 2. Menerima H1 jika prob $< \alpha 5 \%$ (0,05)

Tabel 4
Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	165.620486	3	0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Nilai prob kecil dari 0,05 yaitu 0,0000 menunjukkan kondisi ditolaknya H0. dapat disimpulkan bahwa untuk data menggunakan *fixed effect model*.

Uji Statistik

Uji statistic ialah uji yang dapat melihat ketetapan model berdsarkan beberapa uji diantaranya parsial (uji t), uji simultan (uji f), serta juga menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel dependennya (R²).

1. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil perhitungan *Adjusted R-squared* pada tabel 5.2 diperoleh angka sebesar 0,895373. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 89,5373%, yang artinya besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen sebesar 89,5373%.

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara serempak dapat diketahui menggunakan uji simultan atau uji F. pada saat nilai probabilitas signifikansi (sig) F memiliki angka yang kecil dari 0,05.

Tabel 5
Uji Simultan (Uji Statistik F)

Effects Specification	
Cross-section fixed (dummy variables)	
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F dinyatakan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan belanja barang dan jasa, belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Riau.

3. Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan belanja barang dan jasa) terhadap variabel terikat (kapasitas fiskal). dapat dilihat dari table 5.5 sebagai berikut.

Tabel 6
Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	t-Statistic	Prob.
BBJ	-1.317535	0.1905
BM	5.664360	0.0000
PE	2.295223	0.0237

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Analisis uji parsial menunjukkan hasil yang dijelaskan berikut ini:

1. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Kapasitas Fiskal
Belanja barang dan jasa memiliki nilai signifikan 0,1905, yang artinya nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Artinya tidak terdapa pengaruh antara belanja barang dan jasa dengan kapasitas fiskal di Provinsi Riau.
2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kapasitas Fiskal

Belanja modal memiliki nilai signifikan 0,0000, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Riau.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kapasitas Fiskal

Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0237, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Riau.

Analisis Regresi Panel

Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh persamaan sebagai berikut.

Tabel 7
Analisis Regresi Panel

Variable	Coefficient	Std. Error
C	6.51E+08	1.15E+08
BBJ	-0.247850	0.188116
BM	0.676140	0.119367
PE	22836839	9949725.

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Tabel diatas ialah analisis regresi panel, yang mana persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.51E+08 - 0.247850BBJ + 0.676140BM + 22836839PE$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Riau

Menurut Arsyad (2010) tujuan dari pembangunan adalah mendorong peningkatan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan penduduk. Dlam rangka mendorong kemampuan daerah bertujuan menciptakan kehidupan yang sama dengan daerah lain dapat terwujud melalui terlaksananya kegiatan pembangunan daerah yang yang terencana, keseluruhan, terpadu, memiliki arah, serta dengan tahap – tahap tertentu, mandiri dan berkelanjutan sekaligus secara menyeluruh mendorong peningkatan kesejahteraan yang adil adil dan merata. Dalam peningkatan kemandirian daerah yang bertujuan untuk peningkatan masyarakat adil dan maata yang

adil dan makmur diharapkan dapat terwujud melalui kebijakan otonomi daerah.

Sebagaimana diketahui bahwasanya sebagian besar pelayanan publik sebagian besar ialah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat dan tentunya tidak memiliki pemungutan biaya yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah tetapi lebih kepada peningkatan kualitas layanan baik instansi maupun petugas kepada masyarakat.

Sehingga keadaan inilah yang mendorong belanja barang dan jasa belum mampu mempengaruhi kapasitas fiskal secara parsial, meskipun demikian kondisi belanja barang dan jasa menjadi perlu untuk diperhatikan juga sangat penting untuk diperhatikan sehingga meningkatkan pelayanan publik dan tentunya akan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap kapasitas fiskal di Provinsi Riau

Hasil penelitian melalui analisis regresi panel, diketahui bahwa di Provinsi Riau daerah kabupaten kota bahwasanya kapasitas fiskal dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh belanja modal, hal tersebut terlihat dari nilai probability kecil dari 0,05 yakni 0,0000 yang artinya setiap peningkatan belanja modal akan mendorong peningkatan pada kapasitas fiskal di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

“Meningkatnya kapasitas fiskal akibat perubahan belanja modal disebabkan karena suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.”

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Riau

“Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah menjelaskan terkait dengan kemampuan fiskal suatu daerah dalam menggunakan anggaran secara lebih bebas yang bertujuan untuk

dibelanjakan dan menggambarkan kapasitas fiskal relatif suatu daerah terhadap daerah lain dalam tahun yang sama. Sebaliknya kapasitas fiskal daerah tidak menggambarkan dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat karena tidak memperhitungkan indikator-indikator kesejahteraan dan pembangunan dan tidak menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah (Herdiyana, 2019).”

“Salah satu ukuran dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri ialah PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.”

Sehingga peningkatan pajak akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan PAD, sebagaimana diketahui bahwasanya salah satu sumber PAD yakni penerimaan pajak. sehingga saat PAD meningkat maka hal tersebut akan mendorong peningkatan kapasitas fiskal, disebabkan karena PAD yang merupakan komponen dalam penentuan kapasitas fiskal.

5. KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini ialah :

- a. Belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020. Hal ini berarti perubahan belanja barang dan jasa belum mampu mempengaruhi kondisi kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sehingga berlawanan dengan hipotesis.
- b. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020. Hal ini berarti peningkatan belanja modal dapat mendorong peningkatan kapasitas fiskal, hal ini disebabkan karena peningkatan belanja modal akan mendorong peningkatan penyediaan aset yang dimiliki daerah sehingga keberadaan aset tersebut akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yaitu dari retribusi dan pajak sehingga akan mendorong kemampuan fiskal dengan demikian meningkatkan

kapasitas fiskal berarti sejalan dengan hipotesis.

- c. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif Signifikan terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2020. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan kapasitas fiskal, hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan pendapatan serta produksi barang dan jasa di daerah sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yaitu dari retribusi dan pajak sehingga akan mendorong kemampuan fiskal dengan demikian meningkatkan kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota berarti sejalan dengan hipotesis.

6. REFERENSI

- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Index.
- Hakasari, A. (2015). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Kapasitas Fiskal di Jawa Timur*. Jember: Tesis.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herdiana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 1(1), 112-133.
- Limpele, J. J., Rotinsulu, D. C., & Roro, I. P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan* 22(1), 84-99.
- Lewis, B.D. (2003). Local Borrowing and Repayment in Indonesia: Does Fiscal Capacity Matter. *Jurnal of World Development* 31(6), 1047- 1063.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomi, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 14(1), 1-26
- Mankiw, N. G. (2013). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 56–71.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Petchey, J. D. (2011). Policy Forum: State and Regional Economic Disparities Fiscal Capacity Equalisation of the Australian States. *The Australian Economic Review*, 44(2), 207–214.
- Sriyana, J. (2009). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. *UNISIA* 32 (72), 209-227.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.